



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa, merupakan salah satu pendapatan desa yang dapat digunakan untuk mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan, pemberdayaan masyarakat, pengamanan dan peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan dan penerimaan retribusi daerah;
 - b. bahwa pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa tahun anggaran 2024 sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa sebagai dasar penganggaran dan pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pembagian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa dan berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan dan menyalurkan bagian dari hasil pajak daerah retribusi daerah kepada desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN :

Menimbang : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi adalah bagian dari hasil Pajak dan Retribusi yang diberikan kepada Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai dasar Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan penyaluran dana Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. besaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi;
- b. pengajuan dan penyaluran;
- c. penyusunan dana pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa;
- d. perubahan pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi; dan
- e. pelaporan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi.

BAB II

BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 5

Pemerintah Daerah memberikan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa.

Pasal 6

- (1) Bagian hasil pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan dana yang diberikan kepada Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta untuk pengamanan dan peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan.
- (2) Besaran bagian hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata sama jumlahnya kepada seluruh Desa dari keseluruhan alokasi dana; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional kepada seluruh Desa yang diberikan berdasarkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan realisasi Pajak.
- (3) Besaran bagian hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Bagian hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan dana yang diberikan kepada Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta untuk pengamanan dan peningkatan penerimaan Retribusi.

- (2) Besaran bagian hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata sama jumlahnya kepada seluruh Desa dari keseluruhan alokasi dana; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional kepada seluruh Desa yang diberikan berdasarkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan realisasi Retribusi.
- (3) Besaran bagian hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGAJUAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu Pengajuan

Pasal 8

- (1) Pengajuan permohonan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa dilakukan secara bertahap dengan mekanisme:
 - a. tahap I (pertama) sebesar 50% (lima puluh persen) dapat diajukan paling lambat tanggal 31 Mei tahun berjalan dengan persyaratan menyampaikan surat permohonan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi tahap I (pertama) yang dilampiri dengan rencana penggunaan dana dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi tahun sebelumnya; dan
 - b. tahap II (kedua) sebesar 50 % (lima puluh persen) dapat diajukan paling lambat 15 Desember tahun berjalan dengan persyaratan menyampaikan surat permohonan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi tahap II (kedua) yang dilampiri dengan rencana penggunaan dana tahap II (kedua) dan laporan realisasi penggunaan dana tahap I (pertama);
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa yang terlambat mengajukan permohonan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi dapat mengajukan permohonannya setelah mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (3) Pengajuan permohonan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi untuk Desa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan surat pernyataan *Perbekel* mengenai alasan keterlambatan dan kesiapan untuk mempertanggungjawabkan dana dengan diketahui oleh BPD.

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 9

- (1) Penyaluran dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi dicairkan setelah Pemerintah Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. APBDesa telah ditetapkan;

- b. usulan permohonan dana dan rencana penggunaan dana yang disepakati oleh *Perbekel* dan BPD telah mendapat rekomendasi Camat; dan
 - c. surat pertanggungjawaban tahap sebelumnya dan/atau tahun sebelumnya.
- (2) Penyaluran dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui rekening Pemerintah Desa dan merupakan bagian dari pendapatan Desa yang harus dimasukkan dalam kas Desa.
 - (3) Penyaluran dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara transfer.

BAB IV PENGUNAAN DANA PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KEPADA DESA

Bagian Kesatu Penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak

Pasal 10

- (1) Dana bagian hasil Pajak digunakan untuk:
 - a. membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang merupakan kewenangan Desa; dan
 - b. membiayai penyelenggaraan pengamanan dan peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan.
- (2) Dalam menggunakan dana bagian hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Desa membentuk tim intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak.
- (3) Tim intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di wilayahnya;
 - b. memfasilitasi sosialisasi dan penyuluhan Pajak; dan
 - c. memfasilitasi kegiatan pendataan objek/subjek Pajak.
- (4) Tim intensifikasi dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.
- (5) Tim intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Honorarium tim intensifikasi dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari dana bagian hasil Pajak yang diberikan oleh Desa.

Bagian Kedua Penggunaan Dana Bagian Hasil Retribusi Daerah

Pasal 11

Dana bagian hasil Retribusi digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan Desa serta untuk pengamanan dan peningkatan penerimaan Retribusi.

BAB V
PERUBAHAN PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Perubahan pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi dilakukan apabila ada perubahan dalam penetapan realisasi bagian hasil Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemerintah Desa melakukan perubahan pendapatan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi melalui mekanisme perubahan APBDesa.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 13

Laporan pertanggungjawaban penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi menjadi satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023 NOMOR 48
Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197907202005012013



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANGLI
 NOMOR 48 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH
 DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH

NO	KECAMATAN	DESA	REALISASI PAJAK	LUAS WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH MERATA	BOBOT(0,50 0,33 0,17) Rp. 2.233.652.660,00			JUMLAH PROPOSIONAL	JUMLAH TERIMA TIAP DESA
							1.116.826.330,00	737.105.377,80	379.720.952,20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SUSUT	APUAN	782.996.933,82	411,48	4667	49.271.749,85	15.659.938,68	6.179.954,58	7.641.344,46	29.481.237,72	78.753.000,00
2	SUSUT	DEMULIH	782.996.933,82	443,47	4402	49.271.749,85	15.659.938,68	6.660.346,17	7.207.456,25	29.527.741,10	78.799.000,00
3	SUSUT	ABUAN	782.996.933,82	432,18	7007	49.271.749,85	15.659.938,68	6.490.874,92	11.472.659,24	33.623.472,83	82.895.000,00
4	SUSUT	SUSUT	782.996.933,82	515,69	6338	49.271.749,85	15.659.938,68	7.745.034,35	10.377.296,17	33.782.269,19	83.054.000,00
5	SUSUT	SULAHAN	877.282.648,11	680,19	8507	49.271.749,85	17.545.652,96	10.215.697,11	13.928.630,24	41.689.980,32	90.962.000,00
6	SUSUT	PENGLUMBARAN	877.282.648,11	670,48	4067	49.271.749,85	17.545.652,96	10.069.915,63	6.658.956,06	34.274.524,65	83.546.000,00
7	SUSUT	TIGA	877.282.648,11	1.184,47	7438	49.271.749,85	17.545.652,96	17.789.372,63	12.178.341,57	47.513.367,17	96.785.000,00
8	SUSUT	SELAT	782.996.933,82	263,55	3643	49.271.749,85	15.659.938,68	3.958.269,04	5.964.734,92	25.582.942,64	74.855.000,00
9	SUSUT	PENGIANGAN	877.282.648,11	382,11	3154	49.271.749,85	17.545.652,96	5.738.873,98	5.164.088,37	28.448.615,31	77.720.000,00
1	BANGLI	BUNUTIN	782.996.933,82	290,88	5891	49.271.749,85	15.659.938,68	4.368.696,31	9.645.416,81	29.674.051,79	78.946.000,00
2	BANGLI	TAMANBALI	877.282.648,11	485,74	9518	49.271.749,85	17.545.652,96	7.295.213,99	15.583.954,70	40.424.821,66	89.697.000,00
3	BANGLI	KAYUBIHI	782.996.933,82	985,49	5618	49.271.749,85	15.659.938,68	14.800.986,39	9.198.430,08	39.659.355,15	88.931.000,00
4	BANGLI	PENGOTAN	1.116.330.267,16	1.099,05	4089	49.271.749,85	22.326.605,34	16.506.521,07	6.694.976,97	45.528.103,38	94.800.000,00
5	BANGLI	LANDIH	782.996.933,82	1.283,27	4207	49.271.749,85	15.659.938,68	19.273.230,17	6.888.180,02	41.821.348,86	91.093.000,00
1	TEMBUKU	JEHEM	782.996.933,82	846,83	8372	49.271.749,85	15.659.938,68	12.718.496,27	13.707.592,85	42.086.027,80	91.358.000,00
2	TEMBUKU	TEMBUKU	782.996.933,82	606,55	5334	49.271.749,85	15.659.938,68	9.109.621,13	8.733.432,91	33.502.992,71	82.775.000,00
3	TEMBUKU	YANGAPI	782.996.933,82	1.520,78	9677	49.271.749,85	15.659.938,68	22.840.390,22	15.844.287,63	54.344.616,53	103.616.000,00
4	TEMBUKU	UNDISAN	1.116.330.267,16	290,91	4146	49.271.749,85	22.326.605,34	4.369.104,49	6.788.303,87	33.484.013,70	82.756.000,00
5	TEMBUKU	BANGBANG	782.996.933,82	306,48	5103	49.271.749,85	15.659.938,68	4.602.956,38	8.355.213,37	28.618.108,42	77.890.000,00
6	TEMBUKU	PENINJOAN	782.996.933,82	1.299,04	10746	49.271.749,85	15.659.938,68	19.510.151,27	17.594.576,30	52.764.666,25	102.036.000,00
1	KINTAMANI	MENGANI	782.996.933,82	571,68	1045	49.271.749,85	15.659.938,68	8.585.935,10	1.710.993,14	25.956.866,91	75.229.000,00
2	KINTAMANI	BINYAN	782.996.933,82	207,59	347	49.271.749,85	15.659.938,68	3.117.790,25	568.147,96	19.345.876,89	68.618.000,00
3	KINTAMANI	ULIAN	782.996.933,82	418,86	974	49.271.749,85	15.659.938,68	6.290.752,12	1.594.743,84	23.545.434,64	72.817.000,00
4	KINTAMANI	BUNUTIN	782.996.933,82	342,08	989	49.271.749,85	15.659.938,68	5.137.585,88	1.619.303,55	22.416.828,11	71.689.000,00
5	KINTAMANI	LANGGAHAN	782.996.933,82	314,64	1198	49.271.749,85	15.659.938,68	4.725.599,15	1.961.502,18	22.347.040,00	71.619.000,00
6	KINTAMANI	LEMBEAN	782.996.933,82	393,78	744	49.271.749,85	15.659.938,68	5.914.150,52	1.218.161,62	22.792.250,81	72.064.000,00
7	KINTAMANI	MANIKLIYU	782.996.933,82	763,45	1727	49.271.749,85	15.659.938,68	11.466.176,20	2.827.641,29	29.953.756,16	79.226.000,00
8	KINTAMANI	BAYUNG CERIK	782.996.933,82	310,67	1209	49.271.749,85	15.659.938,68	4.665.842,16	1.979.512,63	22.305.293,47	71.577.000,00
9	KINTAMANI	MANGGUH	517.378.183,82	231,00	762	49.271.749,85	10.347.563,68	3.469.307,91	1.247.633,27	15.064.504,86	64.336.000,00
10	KINTAMANI	BELANCAN	782.996.933,82	1.068,51	2192	49.271.749,85	15.659.938,68	16.047.870,81	3.588.992,30	35.296.801,78	84.569.000,00
11	KINTAMANI	KATUNG	782.996.933,82	349,15	1688	49.271.749,85	15.659.938,68	5.243.832,00	2.763.786,04	23.667.556,71	72.939.000,00
12	KINTAMANI	BANUA	782.996.933,82	82,15	716	49.271.749,85	15.659.938,68	1.233.823,38	1.172.316,83	18.066.078,89	67.338.000,00
13	KINTAMANI	ABUAN	782.996.933,82	381,59	1668	49.271.749,85	15.659.938,68	5.730.975,95	2.731.039,76	24.121.954,39	73.394.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	REALISASI PAJAK	LUAS WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH MERATA	BOBOT(0,50 0,33 0,17) Rp. 2.233.652.660,00			JUMLAH PROPOSIONAL	JUMLAH TERIMA TIAP DESA
							1.116.826.330,00	737.105.377,80	379.720.952,20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	KINTAMANI	BONYOH	782.996.933,82	357,36	1268	49.271.749,85	15.659.938,68	5.367.125,19	2.076.114,16	23.103.178,03	72.375.000,00
15	KINTAMANI	SEKAAN	782.996.933,82	366,96	1930	49.271.749,85	15.659.938,68	5.511.296,71	3.160.016,03	24.331.251,41	73.603.000,00
16	KINTAMANI	BAYUNG GEDE	782.996.933,82	988,64	2271	49.271.749,85	15.659.938,68	14.848.206,22	3.718.340,11	34.226.485,00	83.498.000,00
17	KINTAMANI	SEKARDADI	782.996.933,82	537,07	1940	49.271.749,85	15.659.938,68	8.066.160,17	3.176.389,17	26.902.488,02	76.174.000,00
18	KINTAMANI	KEDISAN	1.210.615.981,44	321,01	1352	49.271.749,85	24.212.319,63	4.821.141,41	2.213.648,54	31.247.109,57	80.519.000,00
19	KINTAMANI	BUAHAN	1.116.330.267,16	417,23	1855	49.271.749,85	22.326.605,34	6.266.359,68	3.037.217,48	31.630.182,50	80.902.000,00
20	KINTAMANI	ABANGSONGAN	517.378.183,82	1.289,07	1296	49.271.749,85	10.347.563,68	19.360.332,82	2.121.958,95	31.829.855,44	81.102.000,00
21	KINTAMANI	SUTER	782.996.933,82	515,21	2072	49.271.749,85	15.659.938,68	7.737.887,80	3.392.514,62	26.790.341,10	76.062.000,00
22	KINTAMANI	ABANG BATUDINDING	782.996.933,82	492,44	2808	49.271.749,85	15.659.938,68	7.395.895,34	4.597.577,73	27.653.411,75	76.925.000,00
23	KINTAMANI	TERUNYAN	782.996.933,82	1.113,68	3081	49.271.749,85	15.659.938,68	16.726.215,99	5.044.564,45	37.430.719,12	86.702.000,00
24	KINTAMANI	SONGAN A	782.996.933,82	1.276,66	7791	49.271.749,85	15.659.938,68	19.174.012,43	12.756.313,42	47.590.264,52	96.862.000,00
25	KINTAMANI	SONGAN B	1.116.330.267,16	2.045,68	11127	49.271.749,85	22.326.605,34	30.723.804,68	18.218.392,94	71.268.802,96	120.541.000,00
26	KINTAMANI	BATUR SELATAN	1.116.330.267,16	2.027,91	6591	49.271.749,85	22.326.605,34	30.456.824,18	10.791.536,61	63.574.966,13	112.847.000,00
27	KINTAMANI	BATUR TENGAH	1.210.615.981,44	1.255,40	3356	49.271.749,85	24.212.319,63	18.854.639,46	5.494.825,80	48.561.784,89	97.834.000,00
28	KINTAMANI	BATUR UTARA	1.116.330.267,16	421,67	1773	49.271.749,85	22.326.605,34	6.332.997,04	2.902.957,73	31.562.560,12	80.834.000,00
29	KINTAMANI	KINTAMANI	1.116.330.267,16	1.458,28	7156	49.271.749,85	22.326.605,34	21.901.715,25	11.716.619,02	55.944.939,62	105.217.000,00
30	KINTAMANI	SERAI	782.996.933,82	501,56	1161	49.271.749,85	15.659.938,68	7.532.933,68	1.900.921,56	25.093.793,92	74.366.000,00
31	KINTAMANI	DAUP	782.996.933,82	249,64	766	49.271.749,85	15.659.938,68	3.749.271,06	1.254.182,53	20.663.392,27	69.935.000,00
32	KINTAMANI	AWAN	782.996.933,82	704,19	1345	49.271.749,85	15.659.938,68	10.576.147,88	2.202.187,34	28.438.273,90	77.710.000,00
33	KINTAMANI	GUNUNGBAU	782.996.933,82	147,69	640	49.271.749,85	15.659.938,68	2.218.133,00	1.047.880,96	18.925.952,64	68.198.000,00
34	KINTAMANI	BELANGA	782.996.933,82	318,98	602	49.271.749,85	15.659.938,68	4.790.750,56	985.663,03	21.436.352,27	70.708.000,00
35	KINTAMANI	BATUKAANG	782.996.933,82	327,72	647	49.271.749,85	15.659.938,68	4.921.967,05	1.059.342,16	21.641.247,89	70.913.000,00
36	KINTAMANI	BELANTIH	782.996.933,82	503,49	2721	49.271.749,85	15.659.938,68	7.561.776,26	4.455.131,41	27.676.846,35	76.949.000,00
37	KINTAMANI	CATUR	782.996.933,82	1.081,95	2041	49.271.749,85	15.659.938,68	16.249.726,75	3.341.757,89	35.251.423,31	84.523.000,00
38	KINTAMANI	PENGEJARAN	517.378.183,82	433,98	811	49.271.749,85	10.347.563,68	6.517.931,76	1.327.861,66	18.193.357,09	67.465.000,00
39	KINTAMANI	SELULUNG	782.996.933,82	1.058,64	2476	49.271.749,85	15.659.938,68	15.899.546,41	4.053.989,48	35.613.474,57	84.885.000,00
40	KINTAMANI	SATRA	782.996.933,82	869,29	4456	49.271.749,85	15.659.938,68	13.055.711,53	7.295.871,21	36.011.521,41	85.283.000,00
41	KINTAMANI	DAUSA	782.996.933,82	544,71	3168	49.271.749,85	15.659.938,68	8.180.989,40	5.187.010,77	29.027.938,84	78.300.000,00
42	KINTAMANI	BANTANG	782.996.933,82	658,14	1773	49.271.749,85	15.659.938,68	9.884.491,14	2.902.957,73	28.447.387,54	77.719.000,00
43	KINTAMANI	SUKAWANA	782.996.933,82	3.200,98	6316	49.271.749,85	15.659.938,68	48.075.023,98	10.341.275,26	74.076.237,92	123.348.000,00
44	KINTAMANI	KUTUH	517.378.183,82	519,53	1557	49.271.749,85	10.347.563,68	7.802.783,85	2.549.297,91	20.699.645,44	69.971.000,00
45	KINTAMANI	SUBAYA	782.996.933,82	463,54	1341	49.271.749,85	15.659.938,68	6.961.796,28	2.195.638,08	24.817.373,04	74.089.000,00
46	KINTAMANI	SIAKIN	782.996.933,82	787,58	2102	49.271.749,85	15.659.938,68	11.828.508,58	3.441.634,04	30.930.081,29	80.202.000,00
47	KINTAMANI	PINGGAN	782.996.933,82	1.869,38	2023	49.271.749,85	15.659.938,68	28.075.924,00	3.312.286,23	47.048.148,91	96.320.000,00
48	KINTAMANI	BELANDINGAN	782.996.933,82	519,61	1121	49.271.749,85	15.659.938,68	7.804.002,72	1.835.429,00	25.299.370,40	74.568.650,00
JUMLAH TOTAL KAB. BANGLI			55.841.316.500,00	49.078,65	231.917,00	3.350.478.990,00	1.116.826.330,00	737.105.377,80	379.720.952,20	2.233.652.660,00	5.584.131.650,00

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG
PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH

NO	KECAMATAN	DESA	REALISASI RETRIBUSI	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	JUMLAH MERATA	BOBOT (0,50 0,33 0,17) Rp. 2.813.280.880,00			JUMLAH PROPORSIONAL	JUMLAH TERIMA TIAP DESA
							1.406.640.440,00	928.382.690,40	478.257.749,60		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SUSUT	APUAN	1.033.291.500,00	4667	411,48	62.057.666,47	20.665.830,00	18.682.382,13	4.009.753,91	43.357.966,04	105.416.000,00
2	SUSUT	DEMULIH	1.033.291.500,00	4402	443,47	62.057.666,47	20.665.830,00	17.621.565,49	4.321.447,47	42.608.842,96	104.667.000,00
3	SUSUT	ABUAN	1.033.291.500,00	7007	432,18	62.057.666,47	20.665.830,00	28.049.593,22	4.211.489,06	52.926.912,28	114.985.000,00
4	SUSUT	SUSUT	1.033.291.500,00	6338	515,69	62.057.666,47	20.665.830,00	25.371.531,59	5.025.228,16	51.062.589,75	113.120.000,00
5	SUSUT	SULAHAN	1.033.291.500,00	8507	680,19	62.057.666,47	20.665.830,00	34.054.215,72	6.628.273,86	61.348.319,58	123.406.000,00
6	SUSUT	PENGLUMBARAN	1.033.291.500,00	4067	670,48	62.057.666,47	20.665.830,00	16.280.533,13	6.533.686,14	43.480.049,27	105.538.000,00
7	SUSUT	TIGA	1.033.291.500,00	7438	1.184,47	62.057.666,47	20.665.830,00	29.774.921,42	11.542.318,89	61.983.070,31	124.041.000,00
8	SUSUT	SELAT	1.033.291.500,00	3643	263,55	62.057.666,47	20.665.830,00	14.583.226,50	2.568.252,66	37.817.309,16	99.875.000,00
9	SUSUT	PENGIANGAN	1.033.291.500,00	3154	382,11	62.057.666,47	20.665.830,00	12.625.719,57	3.723.566,59	37.015.116,16	99.073.000,00
1	BANGLI	BUNUTIN	1.033.291.500,00	5891	290,88	62.057.666,47	20.665.830,00	23.582.154,09	2.834.551,11	47.082.535,19	109.140.000,00
2	BANGLI	TAMANBALI	1.033.291.500,00	9518	485,74	62.057.666,47	20.665.830,00	38.101.331,28	4.733.370,20	63.500.531,48	125.558.000,00
3	BANGLI	KAYUBIHI	1.033.291.500,00	5618	985,49	62.057.666,47	20.665.830,00	22.489.312,79	9.603.357,48	52.758.500,27	114.816.000,00
4	BANGLI	PENGOTAN	1.033.291.500,00	4089	1.099,05	62.057.666,47	20.665.830,00	16.368.600,93	10.709.963,40	47.744.394,33	109.802.000,00
5	BANGLI	LANDIH	1.033.291.500,00	4207	1.283,27	62.057.666,47	20.665.830,00	16.840.964,56	12.505.093,52	50.011.888,09	112.070.000,00
1	TEMBUKU	JEHEM	1.033.291.500,00	8372	846,83	62.057.666,47	20.665.830,00	33.513.799,70	8.252.170,70	62.431.800,40	124.489.000,00
2	TEMBUKU	TEMBUKU	1.033.291.500,00	5334	606,55	62.057.666,47	20.665.830,00	21.352.437,60	5.910.616,08	47.928.883,68	109.987.000,00
3	TEMBUKU	YANGAPI	1.033.291.500,00	9677	1.520,78	62.057.666,47	20.665.830,00	38.737.821,27	14.819.582,05	74.223.233,32	136.281.000,00
4	TEMBUKU	UNDISAN	1.033.291.500,00	4146	290,91	62.057.666,47	20.665.830,00	16.596.776,58	2.834.815,95	40.097.422,53	102.155.000,00
5	TEMBUKU	BANGBANG	1.033.291.500,00	5103	306,48	62.057.666,47	20.665.830,00	20.427.725,73	2.986.546,60	44.080.102,33	106.138.000,00
6	TEMBUKU	PENINJOAN	1.033.291.500,00	10746	1.299,04	62.057.666,47	20.665.830,00	43.017.115,57	12.658.815,58	76.341.761,15	138.399.000,00
1	KINTAMANI	MENGANI	1.033.291.500,00	1045	571,68	62.057.666,47	20.665.830,00	4.183.220,34	5.570.831,69	30.419.882,03	92.478.000,00
2	KINTAMANI	BINYAN	1.033.291.500,00	347	207,59	62.057.666,47	20.665.830,00	1.389.069,34	2.022.922,90	24.077.822,24	86.135.000,00
3	KINTAMANI	ULIAN	1.033.291.500,00	974	418,86	62.057.666,47	20.665.830,00	3.899.001,54	4.081.642,93	28.646.474,47	90.704.000,00
4	KINTAMANI	BUNUTIN	1.033.291.500,00	989	342,08	62.057.666,47	20.665.830,00	3.959.047,77	3.333.431,47	27.958.309,24	90.016.000,00
5	KINTAMANI	LANGGAHAN	1.033.291.500,00	1198	314,64	62.057.666,47	20.665.830,00	4.795.691,83	3.066.121,19	28.527.643,02	90.585.000,00
6	KINTAMANI	LEMBEAN	1.033.291.500,00	744	393,78	62.057.666,47	20.665.830,00	2.978.292,76	3.837.291,66	27.481.414,42	89.539.000,00
7	KINTAMANI	MANIKLIYU	1.033.291.500,00	1727	763,45	62.057.666,47	20.665.830,00	6.913.322,03	7.439.625,04	35.018.777,07	97.076.000,00
8	KINTAMANI	BAYUNG CERIK	1.033.291.500,00	1209	310,67	62.057.666,47	20.665.830,00	4.839.725,73	3.027.348,93	28.532.904,66	90.591.000,00
9	KINTAMANI	MANGGUH	1.033.291.500,00	762	231,00	62.057.666,47	20.665.830,00	3.050.348,23	2.250.998,90	25.967.177,13	88.025.000,00
10	KINTAMANI	BELANCAN	1.033.291.500,00	2192	1.068,51	62.057.666,47	20.665.830,00	8.774.755,01	10.412.376,32	39.852.961,32	101.911.000,00
11	KINTAMANI	KATUNG	1.033.291.500,00	1688	349,15	62.057.666,47	20.665.830,00	6.757.201,85	3.402.367,38	30.825.399,23	92.883.000,00
12	KINTAMANI	BANUA	1.033.291.500,00	716	82,15	62.057.666,47	20.665.830,00	2.866.206,47	800.544,42	24.332.580,89	86.390.000,00
13	KINTAMANI	ABUAN	1.033.291.500,00	1668	381,59	62.057.666,47	20.665.830,00	6.677.140,22	3.718.442,09	31.061.412,31	93.119.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	REALISASI RETRIBUSI	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	JUMLAH MERATA	BOBOT (0,50 0,33 0,17) Rp. 2.813.280.880,00			JUMLAH PROPORSONAL	JUMLAH TERIMA TIAP DESA
							1.406.640.440,00	928.382.690,40	478.257.749,60		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	KINTAMANI	BONYOH	1.033.291.500,00	1268	357,36	62.057.666,47	20.665.830,00	5.075.907,55	3.482.363,98	29.224.101,53	91.282.000,00
15	KINTAMANI	SEKAAN	1.033.291.500,00	1930	366,96	62.057.666,47	20.665.830,00	7.725.947,61	3.575.907,11	31.967.684,72	94.025.000,00
16	KINTAMANI	BAYUNG GEDE	1.033.291.500,00	2271	988,64	62.057.666,47	20.665.830,00	9.090.998,46	9.633.995,23	39.390.823,69	101.448.000,00
17	KINTAMANI	SEKARDADI	1.033.291.500,00	1940	537,07	62.057.666,47	20.665.830,00	7.765.978,43	5.233.584,95	33.665.393,38	95.723.000,00
18	KINTAMANI	KEDISAN	1.033.291.500,00	1352	321,01	62.057.666,47	20.665.830,00	5.412.166,41	3.128.112,09	29.206.108,50	91.264.000,00
19	KINTAMANI	BUAHAN	1.033.291.500,00	1855	417,23	62.057.666,47	20.665.830,00	7.425.716,49	4.065.816,32	32.157.362,81	94.215.000,00
20	KINTAMANI	ABANGSONGAN	1.033.291.500,00	1296	1.289,07	62.057.666,47	20.665.830,00	5.187.993,84	12.561.608,53	38.415.432,37	100.473.000,00
21	KINTAMANI	SUTER	1.033.291.500,00	2072	515,21	62.057.666,47	20.665.830,00	8.294.385,21	5.020.591,25	33.980.806,46	96.038.000,00
22	KINTAMANI	ABANG BATUDINDING	1.033.291.500,00	2808	492,44	62.057.666,47	20.665.830,00	11.240.653,31	4.798.695,51	36.705.178,82	98.763.000,00
23	KINTAMANI	TERUNYAN	1.101.491.500,00	3081	1.113,68	62.057.666,47	22.029.830,00	12.333.494,61	10.852.508,56	45.215.833,17	107.273.000,00
24	KINTAMANI	SONGAN A	1.033.291.500,00	7791	1.276,66	62.057.666,47	20.665.830,00	31.188.009,25	12.440.717,86	64.294.557,11	126.352.000,00
25	KINTAMANI	SONGAN B	1.033.291.500,00	11127	2.045,68	62.057.666,47	20.665.830,00	44.542.289,68	19.934.595,69	85.142.715,37	147.200.000,00
26	KINTAMANI	BATUR SELATAN	1.033.291.500,00	6591	2.027,91	62.057.666,47	20.665.830,00	26.384.311,25	19.761.370,12	66.811.511,38	128.869.000,00
27	KINTAMANI	BATUR TENGAH	1.033.291.500,00	3356	1.255,40	62.057.666,47	20.665.830,00	13.434.342,07	12.233.498,37	46.333.670,43	108.391.000,00
28	KINTAMANI	BATUR UTARA	1.033.291.500,00	1773	421,67	62.057.666,47	20.665.830,00	7.097.463,79	4.109.052,80	31.872.346,59	93.930.000,00
29	KINTAMANI	KINTAMANI	1.033.291.500,00	7156	1.458,28	62.057.666,47	20.665.830,00	28.646.052,39	14.210.539,45	63.522.421,84	125.580.000,00
30	KINTAMANI	SERAI	1.033.291.500,00	1161	501,56	62.057.666,47	20.665.830,00	4.647.577,81	4.887.610,40	30.201.018,21	92.259.000,00
31	KINTAMANI	DAUP	1.033.291.500,00	766	249,64	62.057.666,47	20.665.830,00	3.066.360,56	2.432.648,02	26.164.838,58	88.223.000,00
32	KINTAMANI	AWAN	1.033.291.500,00	1345	704,19	62.057.666,47	20.665.830,00	5.384.144,84	6.862.145,95	32.912.120,79	94.970.000,00
33	KINTAMANI	GUNUNGBAU	1.033.291.500,00	640	147,69	62.057.666,47	20.665.830,00	2.561.972,27	1.439.196,25	24.666.998,52	86.725.000,00
34	KINTAMANI	BELANGA	1.033.291.500,00	602	318,98	62.057.666,47	20.665.830,00	2.409.855,16	3.108.393,52	26.184.078,69	88.242.000,00
35	KINTAMANI	BATUKAANG	1.033.291.500,00	647	327,72	62.057.666,47	20.665.830,00	2.589.993,84	3.193.531,01	26.449.354,85	88.507.000,00
36	KINTAMANI	BELANTIH	1.033.291.500,00	2721	503,49	62.057.666,47	20.665.830,00	10.892.385,21	4.906.324,40	36.464.539,61	98.522.000,00
37	KINTAMANI	CATUR	1.033.291.500,00	2041	1.081,95	62.057.666,47	20.665.830,00	8.170.289,68	10.543.346,96	39.379.466,64	101.437.000,00
38	KINTAMANI	PENGEJARAN	1.033.291.500,00	811	433,98	62.057.666,47	20.665.830,00	3.246.499,23	4.229.044,41	28.141.373,64	90.199.000,00
39	KINTAMANI	SELULUNG	1.033.291.500,00	2476	1.058,64	62.057.666,47	20.665.830,00	9.911.630,20	10.316.138,66	40.893.598,86	102.951.000,00
40	KINTAMANI	SATRA	1.033.291.500,00	4456	869,29	62.057.666,47	20.665.830,00	17.837.731,90	8.470.966,84	46.974.528,74	109.032.000,00
41	KINTAMANI	DAUSA	1.033.291.500,00	3168	544,71	62.057.666,47	20.665.830,00	12.681.762,71	5.308.089,86	38.655.682,57	100.713.000,00
42	KINTAMANI	BANTANG	1.033.291.500,00	1773	658,14	62.057.666,47	20.665.830,00	7.097.463,79	6.413.376,74	34.176.670,53	96.234.000,00
43	KINTAMANI	SUKAWANA	1.033.291.500,00	6316	3.200,98	62.057.666,47	20.665.830,00	25.283.463,79	31.192.626,56	77.141.920,35	139.200.000,00
44	KINTAMANI	KUTUH	1.033.291.500,00	1557	519,53	62.057.666,47	20.665.830,00	6.232.798,15	5.062.697,90	31.961.326,05	94.019.000,00
45	KINTAMANI	SUBAYA	1.033.291.500,00	1341	463,54	62.057.666,47	20.665.830,00	5.368.132,51	4.517.038,03	30.551.000,54	92.609.000,00
46	KINTAMANI	SIAKIN	1.033.291.500,00	2102	787,58	62.057.666,47	20.665.830,00	8.414.477,66	7.674.717,98	36.755.025,64	98.813.000,00
47	KINTAMANI	PINGGAN	1.033.291.500,00	2023	1.869,38	62.057.666,47	20.665.830,00	8.098.234,21	18.216.565,28	46.980.629,48	109.038.000,00
48	KINTAMANI	BELANDINGAN	1.033.291.500,00	1121	519,61	62.057.666,47	20.665.830,00	4.487.454,55	5.063.488,74	30.216.773,29	92.275.200,00
JUMLAH TOTAL KAB. BANGLI			70.332.022.000,00	231.917,00	49.078,65	4.219.921.320,00	1.406.640.440,00	928.382.690,40	478.257.749,60	2.813.280.880,00	7.033.202.200,00

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA